

EFEKTIVITAS PROGRAM CENGKRAMAN MATA ELANG DALAM MENCEGAH KASUS STUNTING DI KABUPATEN DEMAK

Anis Wahsyati, Dewi Rostyaningsih, Hardi Warsono

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang Kode Pos
50275 Telepon/Faksimile (024) 74605407

Laman : <https://www.fisip.undip.ac.id> E-mail : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

This research aims to analyze the effectiveness of the Cengkraman Mata Elang program in preventing stunting cases in Demak Regency and explain the supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative approach with a descriptive research model. Data collection techniques include interviews and documentation. The effectiveness of the Cengkraman Mata Elang program is measured through four criteria including program socialization, achievement of objectives, accuracy of implementation, and program monitoring. The research results show that the Cengkraman Mata Elang program to prevent stunting has not been effective. The criteria for program socialization and achievement of goals have not been effective. Program socialization has not been effective because cadres as targets and implementers of the Cengkraman Mata Elang program have low awareness in inputting and reporting the condition of pregnant women and toddlers; and cadre loyalty and professionalism are also still low. The criteria for achieving the goal are not yet effective because the change in stunting cases in Demak Regency has not yet reached the national reduction target and health workers as application users still experience technical obstacles that hamper their performance in preventing and dealing with stunting. Supporting factors include the availability of a special budget for the Cengkraman Mata Elang program as well as specifically for preventing and handling stunting; support for stunting prevention and management from various OPDs in Demak Regency; condition and availability of complete infrastructure for the Cengkraman Mata Elang application; and there is intense assistance to the target group. The inhibiting factor is the absence of budget assistance for cadres as program implementers. Suggestions that can be given are the need to provide a survey questionnaire which is filled out by cadres every month, the need to provide a policy that cadres are required to report data on the condition of pregnant women and toddlers, the need for cooperation with the Civil Registry Office to synchronize NIK and personal data, the need for system updates in the form of automatic data recording, and the need to provide incentives and rewards to cadres.

Keywords: *Effectiveness, Program, Cengkraman Mata Elang Application.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program Cengkraman Mata Elang dalam mencegah kasus *stunting* di Kabupaten Demak serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Teknis pengumpulan data dilakukan meliputi wawancara dan dokumentasi. Efektivitas program Cengkraman Mata Elang diukur melalui empat kriteria meliputi sosialisasi program, tercapainya tujuan, ketepatan pelaksana, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan program Cengkraman Mata Elang untuk mencegah *stunting* belum efektif. Kriteria sosialisasi program dan tercapainya tujuan belum berjalan efektif. Sosialisasi program belum efektif karena kader selaku sasaran dan pelaksana program Cengkraman Mata Elang memiliki kesadaran yang masih rendah dalam menginput dan melaporkan kondisi ibu hamil dan balita; serta loyalitas dan profesionalitas kader juga masih rendah. Kriteria tercapainya tujuan belum efektif karena perubahan kasus *stunting* di Kabupaten Demak belum mencapai target penurunan nasional dan tenaga kesehatan selaku pengguna aplikasi masih mengalami kendala teknis yang menghambat kinerjanya dalam mencegah dan menangani *stunting*. Faktor pendukungnya berupa tersedianya anggaran khusus program Cengkraman Mata Elang serta khusus pencegahan dan penanganan *stunting*; dukungan bantuan pencegahan dan penanganan *stunting* dari berbagai OPD di Kabupaten Demak; kondisi dan ketersediaan sarana prasarana aplikasi Cengkraman Mata Elang yang lengkap; dan adanya pendampingan yang intens kepada kelompok sasaran. Faktor penghambatnya yaitu tidak adanya bantuan anggaran untuk kader selaku pelaksana program. Saran yang dapat diberikan yaitu perlunya pemberian angket survey yang diisi oleh kader setiap bulannya, perlunya pemberian kebijakan bahwa kader wajib melaporkan data kondisi ibu hamil dan balita, perlunya kerjasama dengan Dindikcapil untuk sinkronasi NIK dan data pribadi, perlunya pembaharuan sistem berupa perekapan data otomatis, dan perlunya pemberian insentif dan *reward* kepada kader.

Kata kunci : Efektivitas, Program, Aplikasi Cengkraman Mata Elang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

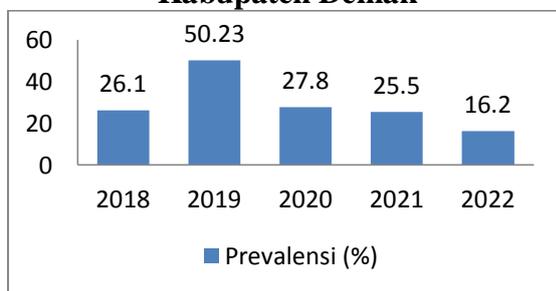
Stunting menjadi salah satu prioritas utama masalah kesehatan di Indonesia yang harus diselesaikan karena berpotensi mempengaruhi pertumbuhan fisik anak dan berdampak jangka panjang pada kognisi, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa dewasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, *stunting* merupakan gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang

yang ditandai dengan tinggi badan anak berada di bawah standar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022 tingkat prevalensi *stunting* pada balita di Indonesia mencapai 21,6%.

Menurut WHO, standar penurunan *stunting* harus di bawah 20%. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran penurunan *stunting* di Indonesia pada tahun 2024 yaitu 14% dengan rata-rata penurunan *stunting* pada balita 2,7% per tahun.

Berdasarkan Surat Keterangan Menteri PPN/Bappenas yang digunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam melakukan intervensi sesuai bidang terkait yang ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, target lokus diperluas hingga 514 kabupaten/kota sampai tahun 2024 termasuk Kabupaten Demak.

Gambar 1.1 Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Demak



Sumber : *Survey Status Gizi Indonesia (2022)*

Dilihat dari gambar di atas, pada tahun 2019 prevalensi *stunting* pada seluruh balita di Kabupaten Demak sangat tinggi sebesar 50,23%. Akibatnya pada tahun 2019 Kabupaten Demak menempati urutan ke 7 dari 35 Kabupaten/Kota dengan kasus *stunting* tertinggi di Jawa Tengah. Dikutip dari media berita Portal Demak (2023), Kepala Puskesmas Mranggen 3 mengemukakan bahwa salah satu penyebab tingginya *stunting* di Kabupaten Demak yaitu jumlah balita yang datang ke posyandu tidak sebanyak angka sasaran. Selain itu disebabkan oleh keterlambatan penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Demak sehingga angka melonjak tinggi.

Sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Handayani, *et.al* (2022) mengenai Pemberdayaan Kader Remaja Santun di Kecamatan Guntur Demak mengemukakan bahwa penyebab *stunting* di Kabupaten Demak yaitu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai faktor penyebab dan pencegahan *stunting*. Rendahnya pengetahuan ini salah satunya disebabkan faktor pendidikan yang rendah.

Pemerintah Kabupaten Demak telah menerbitkan regulasi untuk mempercepat penanganan *stunting* meliputi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi *Stunting* dan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Demak Tahun 2019-2021. Percepatan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Demak juga diperkuat melalui pemanfaatan salah satu program berbasis digital yaitu program Cengkraman Mata Elang.

Program Cengkraman Mata Elang merupakan aplikasi digital yang berfungsi memantau dan mendeteksi ibu hamil berisiko tinggi dan indikasi *stunting* pada balita. Program ini dicetuskan oleh Kepala Puskesmas Bonang II pada tahun 2017 untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kecamatan Bonang. Program Cengkraman Mata Elang telah terintegrasi pada 27 puskesmas di

Kabupaten Demak. Pada tahun 2020, program ini telah dikembangkan untuk mencegah *stunting* melalui fitur penambahan fitur *stunting*.

Pelaksanaan program Cengkraman Mata Elang mengandalkan kekuatan kader sebagai pelaksana program. Kader merupakan masyarakat yang telah diberdayakan secara terstruktur. Berdasarkan informasi dari Dinkes Kabupaten Demak, saat ini kader di Kabupaten Demak berjumlah kurang lebih 6000 kader. Kader bertugas memantau dan melaporkan kondisi ibu hamil dan balita baik saat posyandu maupun di lingkungan sekitarnya melalui aplikasi Cengkraman Mata Elang.

Program Cengkraman Mata Elang dalam mencegah *stunting* di Kabupaten Demak memiliki tiga tujuan sekaligus terdapat permasalahan pada masing-masing tujuan tersebut. Tujuan pertama, mencegah *stunting* di Kabupaten Demak. Namun, berdasarkan hasil pemantauan Status Gizi pada tahun 2022, prevalensi *stunting* di Kabupaten Demak sebesar 16,2%. Namun, penurunan tersebut belum memenuhi pencapaian target penurunan *stunting* - secara nasional yaitu sebesar 14%.

Tujuan kedua, terciptanya sinergitas antar aktor meliputi pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat baik kader atau masyarakat diluar kader. Jumlah kader di Kabupaten Demak kurang lebih mencapai

6000 kader, namun jumlah pengguna aplikasi Cengkraman Mata Elang sesuai informasi pada *google play* hanya berjumlah kurang lebih 4000 pengguna yang mengunduh aplikasi. Artinya tidak semua kader di Kabupaten Demak telah menggunakan aplikasi Cengkraman Mata Elang. Akibatnya deteksi dini balita *stunting* lambat terdeteksi sehingga berimbas pada sulitnya mencapai target penurunan *stunting* secara nasional. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah kader yang tergolong sangat banyak ternyata belum mampu mendorong Kabupaten Demak mencapai target penurunan *stunting* secara nasional yaitu 14%.

Pelaksanaan program Cengkraman Mata Elang melibatkan aktor dari pusat hingga bawah. Dari hasil interview dengan petugas kesehatan di Puskesmas Bonang II, selama berjalannya program Cengkraman Mata Elang belum ada koordinasi yang melibatkan seluruh *stakeholders* mulai dari Dinkes, Dinkominfo, tenaga kesehatan dari 27 puskesmas, dan kader. Kader belum pernah terlibat koordinasi langsung dengan seluruh aktor tersebut.

Di samping itu, Masyarakat umum memiliki keterbatasan dalam menggunakan aplikasi Cengkraman Mata Elang karena mereka hanya diberi kesempatan untuk melaporkan ibu hamil berisiko tinggi dan balita *stunting*. Masyarakat umum tidak diberikan akses untuk masuk ke dalam

aplikasi Cengkraman Mata Elang untuk mengetahui perkembangan *stunting* di Kabupaten Demak. Hanya pihak yang memiliki *user* yang dapat *log in* ke dalam aplikasi.

Ketiga, membantu tugas tenaga kesehatan dalam memantau ibu hamil berisiko tinggi dan balita *stunting*. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Ketua Puskesmas Bonang II, masing-masing Puskesmas di Kabupaten Demak memiliki jumlah pegawai serta jam kerja kerja terbatas untuk menangani banyaknya masalah kesehatan dari masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan fokus untuk menangani *stunting* terpecah karena seluruh masalah kesehatan dari masyarakat perlu mendapat penanganan dari tenaga kesehatan di puskesmas.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Efektivitas Program Cengkraman Mata Elang Dalam Mencegah Kasus *Stunting* Di Kabupaten Demak.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program Cengkraman Mata Elang dalam mencegah kasus *stunting* di Kabupaten Demak ?.

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai efektivitas program Cengkraman Mata Elang dalam mencegah kasus *stunting* di Kabupaten Demak ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas program Cengkraman Mata Elang dalam mencegah kasus *stunting* di Kabupaten Demak.
2. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai efektivitas program Cengkraman Mata Elang dalam mencegah kasus *stunting* di Kabupaten Demak.

D. Kajian Teori

a) Efektivitas Program

Menurut Stoner (dalam Anis, *et.al.*, 2021) efektivitas merupakan kemampuan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Robbins dalam Norsanti (2021) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Menurut Robbins dalam Norsanti (2021) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara).

Jones dalam Mayasoni (2022) mengemukakan bahwa efektivitas program merupakan sebuah penilaian atau

pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dijalankan mampu mencapai tujuan awal dari program tersebut. Makmur dalam Najidah dan Lestari (2019) menyatakan bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menunjukkan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang ingin dicapai, harapan tersebut ditunjukkan dengan Ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai. Najidah dan Lestari (2019) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan tingkat perwujudan dari perumusan tujuan yang ditentukan oleh sebuah kelompok yang di dalamnya memuat tugas-tugas pokok.

Nugroho (2012) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan menggunakan kriteria sebagai berikut.

1. **Ketepatan program**, dinilai berdasarkan sejauh mana program telah menyelesaikan permasalahan maupun rumusan karakter permasalahan yang akan diselesaikan.
2. **Ketepatan Pelaksana**, terdiri dari pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, serta implementasi kebijakan yang sifatnya monopoli. Ketepatan pelaksana dapat diukur melalui tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya dan bentuk kerja

sama yang dilakukan tenaga kerja dalam program yang akan dijalankan.

3. **Ketepatan Target**, bertujuan untuk mengetahui intervensi terhadap target yang telah direncanakan, tidak mengalami tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, serta intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
4. **Ketepatan Lingkungan**, dibagi menjadi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal menyangkut interaksi antara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga tertentu. Lingkungan eksternal menyangkut persepsi publik mengenai kebijakan dan implementasinya.
5. **Ketepatan Proses**, meliputi tiga proses yaitu *Policy acceptance*, *Policy Adoption*, dan *Strategic Readiness*.
Sutrisno (2010) mengemukakan bahwa kriteria-kriteria efektivitas program antara lain sebagai berikut.
 1. **Ketepatan Pemahaman**, adalah realisasi program sehingga program dapat berjalan dengan lancar, pemahaman program diperlukan oleh para sasaran program agar berjalan dengan baik.
 2. **Ketepatan sasaran**, adalah sasaran yang dituju harus sesuai dengan aturan

yang telah ditentukan sebelumnya agar program dapat dilaksanakan dengan efektif.

3. **Ketepatan waktu**, sebuah program dikatakan efektif apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan semakin tepat waktu suatu program maka semakin efektif juga program tersebut.
4. **Tercapainya tujuan**, tujuan pelaksanaan program dapat dikatakan tercapai apabila program tersebut mampu memberikan manfaat terhadap sasaran program.
5. **Perubahan nyata**, program disebut telah efektif apabila program memiliki perubahan nyata yang diperoleh secara langsung oleh sasaran program.

Budiani (2007:53) mengemukakan bahwa untuk efektivitas sebuah program dapat dilihat melalui kriteria - kriteria sebagai berikut.

1. **Ketepatan sasaran program**, yaitu sejauh mana peserta yang dituju telah tepat sasaran sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. **Sosialisasi program**, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.
3. **Pencapaian tujuan program**, yaitu tingkat kesesuaian antara hasil

pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. **Pemantauan program**, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah program dijalankan atau diimplementasikan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

b) Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Program

Starman (dalam Kunarjo, 2002) mengemukakan bahwa faktor pendukung untuk menilai keberhasilan efektivitas program sebagai berikut.

1. **Peranan pendamping**, adalah sumber daya pendamping yang berperan memberikan pendampingan kepada individu maupun kelompok dalam kegiatan masyarakat yang bertugas sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator untuk mencukupi kebutuhan dan pemecahan masalah masing-masing individu maupun kelompok.
2. **Partisipasi masyarakat**, yaitu proses ketika masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta berperan memberikan pengaruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Soemarto, 2003).

3. Kemampuan kelompok sasaran, yaitu kemampuan yang meliputi kemampuan berkomunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, bersikap mandiri dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan karakteristik sasaran.

Bardach (dalam Tarigan, 2007) mengemukakan bahwa efektivitas program juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menghambat berjalannya program antara lain meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya komitmen pelaksana dan kurang memadainya struktur organisasi. Cheema dan Rondinelli (dalam Mutiarin, 2014) mengemukakan efektivitas program dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

1. Kondisi lingkungan, adalah elemen sistem lingkungan yang mampu memberikan pengaruh terhadap keberhasilan sebuah program yang mencakup lingkungan sosio kultural dan keterlibatan penerimaan program.

2. Hubungan antar organisasi, adalah hubungan kerjasama dan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program untuk mencapai sebuah keberhasilan yang berfokus pada upaya mengatasi perubahan di seluruh organisasi dan bagaimana organisasi bekerja sama serta memberikan landasan untuk memahami dan meningkatkan mobilisasi aktor yang terlibat untuk mengatasi permasalahan.

3. Sumber daya, adalah sumber pendukung baik manusia maupun non manusia yang berguna pada kelancaran program. Menurut Edward III (dalam Umroh dan Endahsari, 2019) sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial (dana atau anggaran), sumber daya fasilitas, dan sumber daya informasi.

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, merupakan keterlibatan sumber daya dalam pelaksanaan program mencakup struktur organisasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

E. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *snowball sampling* dengan informan utama yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Dari teknik tersebut didapatkan informasi informan lainnya yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, Puskesmas Bonang II dan Kader Posyandu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, mengamati kembali hasil data, menyusun laporan

hingga membuat kesimpulan. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi sumber data yakni dilakukan dengan cara menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Cengkraman Mata Elang Dalam Mencegah Kasus *Stunting* di Kabupaten Demak

a) Sosialisasi Program

Menurut Novianti (2019), pelaksanaan sosialisasi bertujuan membantu meningkatkan informasi dan pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan sebuah program. Dalam program Cengkraman Mata Elang, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak telah menyelenggarakan sosialisasi sekaligus pelatihan kader yang didampingi oleh fasilitator dari Dinkominfo dan Puskesmas Bonang II. Sosialisasi dilaksanakan satu tahun sekali sebanyak 8 tahap, dalam satu harinya menghadirkan 2 puskesmas yang diwakili oleh 4-5 kader serta bidan desa per desanya. Hal ini karena puskesmas di Kabupaten Demak berjumlah 27 Puskesmas dan kadernya kurang lebih berjumlah 6000 kader.

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinkes Kabupaten Demak dilakukan secara luring atau tatap muka secara langsung. Di luar dari pelaksanaan sosialisasi, segala bentuk penyampaian

informasi mengenai program Cengkraman Mata Elang juga disampaikan dalam bentuk tertulis melalui platform media *whatsapp*. Tidak hanya itu, untuk mempromosikan aplikasi Cengkraman Mata Elang baik Dinkes, Dinkominfo dan puskesmas telah menyebarkan informasi melalui media sosial yang mereka miliki seperti instagram, tiktok dan youtube. Masing-masing puskesmas juga telah berpartisipasi melatih kader pada desa di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil wawancara, puskesmas difasilitasi anggaran DAK non fisik untuk melatih kader. Pelatihan kader yang dilakukan oleh puskesmas sebagian besar dilaksanakan bersamaan dengan agenda posyandu di desa.

Hardjana (2010) mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses menyampaikan informasi untuk memberikan pemahaman dan penerimaan nilai, norma dan membangkitkan rasa percaya dalam organisasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, selama sosialisasi program Cengkraman Mata Elang, kader selaku peserta sosialisasi telah dibekali informasi meliputi meliputi informasi awal terbentuknya program, tujuan dibentuknya program, pihak-pihak yang terlibat, keunikan program Cengkraman Mata Elang, dan informasi mengenai menu layanan dan langkah-langkah dalam memanfaatkan aplikasi khususnya dalam mencegah *stunting*.

Sehubungan dengan informasi yang diberikan serta pelatihan secara langsung yang diberikan kader, pemahaman kader dalam menerima informasi yang disampaikan menjadi pokok yang sangat penting. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Andriani (2018) bahwa pengetahuan dan pemahaman sebuah program merupakan aspek penting dalam menyelenggarakan sebuah program, dalam arti lain bahwa sasaran program mampu memahami program dan menyampaikan informasi dari program yang sedang berjalan. Selama berjalannya program hingga saat ini diketahui bahwa tingkat kesadaran kader dalam melaksanakan tugasnya berupa menginput dan melaporkan kondisi ibu hamil dan balita terutama yang terindikasi *stunting* mengalami penurunan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa dari 27 puskesmas di Kabupaten Demak, saat ini hanya kader di wilayah kerja Puskesmas Bonang II yang masih stabil melaporkan kondisi ibu hamil dan balita melalui aplikasi Cengkraman Mata Elang. Kader kembali giat melakukan penginputan dan pelaporan apabila mendapatkan peringatan baik dari bidan atau puskesmas.

Bentuk permasalahan lain yang ditemukan yaitu kader yang telah terlatih banyak yang mengundurkan diri tanpa sebab atau karena pergantian kepala desa periode baru. Alasannya karena

permasalahan pribadi antar kedua belah pihak. Bahkan kader ada yang secara sengaja diberhentikan oleh kepala desa dan diganti dengan kader lain yang belum pernah mengikuti pelatihan. Pergantian kader yang cukup banyak mengakibatkan pendeteksian *stunting* pada balita semakin lama ditemukan karena kader yang baru harus beradaptasi dalam melaksanakan tugasnya menggunakan aplikasi Cengkraman Mata Elang. Kondisi ini berimbas pada terhambatnya tugas tenaga kesehatan dalam mencegah dan menangani *stunting* karena keterbatasan pemantauan perkembangan *stunting*. Bahkan tenaga kesehatan khususnya di tingkat puskesmas atau desa harus menyelenggarakan sosialisasi berulang kali. Hal demikian menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas dan loyalitas kader masih rendah.

Selama sosialisasi berlangsung juga ditemukan kendala-kendala berupa gangguan server pada aplikasi dan jaringan yang kurang stabil selama praktik berlangsung. Selain itu, ditemukan *handphone* kader yang ternyata kurang mendukung untuk mengakses aplikasi Cengkraman Mata Elang serta kurangnya paket data yang dimiliki oleh kader. Padahal sebelum pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berlangsung, Dinkes selaku penyelenggara telah menghimbau yang hadir harus memiliki *handphone* yang

mumpuni agar dapat mengikuti pelatihan bersama-sama.

Dengan demikian, kriteria sosialisasi program dapat dikatakan belum efektif. Hal ini berdasarkan dari temuan dari permasalahan dan kendala pada sosialisasi program Cengkraman Mata Elang. Kesadaran dan loyalitas kader yang rendah dalam melaksanakan tugasnya pada program Cengkraman Mata Elang menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan kepada kader belum berhasil.

b) Tercapainya Tujuan

Menurut Anis (2021), apabila tujuan yang telah ditetapkan pada sebuah program telah tercapai dengan baik maka program tersebut dapat dikatakan efektif begitu pula sebaliknya. Sejalan dengan tujuan program Cengkraman Mata Elang yaitu mencegah *stunting* di Kabupaten Demak, maka program ini diharapkan mampu mengubah kasus *stunting* di Kabupaten Demak hingga mencapai target penurunan prevalensi *stunting* secara nasional. Sebagaimana yang diungkapkan Sutrisno (dalam Marwiyah, Rahmadi, dan Aisyah., 2022) bahwa perubahan nyata merupakan dampak yang dapat diterima oleh sasaran atau pihak penyelenggara program.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinkes Kabupaten Demak, kasus *stunting* dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019,

prevalensi *stunting* di Kabupaten Demak mencapai 50,23%. Sedangkan pada tahun 2022 mencapai 16,2%. Namun, penurunan tersebut belum mampu mencapai target penurunan nasional yaitu 14%. Sejalan dengan prevalensi *stunting*, jumlah balita *stunting* berdasarkan hasil penimbangan serentak di Kabupaten Demak dari tahun 2019 hingga 2023 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2019, sebanyak 3.510 atau 3,66% balita teridentifikasi *stunting* dari 95.972 balita yang ditimbang. Sedangkan pada tahun 2023, sebanyak 2.218 atau 2,33% balita teridentifikasi *stunting* dari 95.185 balita yang ditimbang. Penurunan tersebut salah satunya terbantu oleh sistem deteksi dini atau *early warning system* dari aplikasi Cengkraman Mata Elang. Sistem tersebut mampu membantu mendeteksi dini *stunting* lebih cepat dibandingkan mengidentifikasi *stunting* secara manual. Meski demikian, penurunan *stunting* tidak sepenuhnya disebabkan oleh program Cengkraman Mata Elang karena program ini sifatnya hanya membantu.

Tujuan dari program Cengkraman Mata Elang juga memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan dalam mencegah dan menangani *stunting*. Menurut Davis (dalam Irianto, 2020) persepsi kemudahan penggunaan merupakan ukuran dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi adalah sesuatu yang mudah dan tidak memerlukan usaha yang

keras. Sistem aplikasi yang sederhana disertai fitur yang lengkap telah memberikan kemudahan bagi tenaga dalam menjalankan tugasnya mencegah dan menangani *stunting*. Tenaga kesehatan dapat memantau perkembangan *stunting* dari hasil laporan yang diunggah kader melalui aplikasi tanpa harus meninjau satu per satu balita di lapangan. Balita yang terindikasi *stunting* juga lebih cepat mendapatkan intervensi karena aplikasi Cengkraman Mata Elang telah dilengkapi Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga alamat pasien mudah ditemui karena terhubung dengan *google maps*. Maka Tenaga kesehatan dapat membantu memberikan layanan rujukan pada fasilitas kesehatan yang lengkap.

Hasibuan (dalam Samsudin, Kusuma, dan Djaja., 2017) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah sarana dan prasarana. Sama halnya dalam program Cengkraman Mata Elang ditemukan kendala berupa gangguan server. Bahkan saat ditambahkan fitur *stunting* pada aplikasi terjadi kendala berupa *double data* sehingga menyulitkan petugas dalam merekap data yang baru. Meski tergolong program digital, kelemahan dari aplikasi ini yaitu perekapan data secara keseluruhan masih bersifat manual karena tidak bisa unduh dalam bentuk *file excel* sehingga tidak dapat di *print out* secara langsung

serta data masih bersifat global artinya data belum bisa dipetakan per bulan untuk memudahkan pemantauan setiap bulannya. Akibatnya rentan berpotensi adanya *double data*. Aplikasi ini juga belum ada sinkronisasi antara NIK dan data pribadi masyarakat secara langsung sehingga riskan terjadi kesalahan dalam penginputan data.

Dengan demikian disimpulkan bahwa kriteria tercapainya tujuan program Cengkraman Mata Elang belum dapat dikatakan efektif. Hal ini karena program Cengkraman Mata Elang telah membantu menurunkan jumlah *stunting* di Kabupaten Demak namun belum mampu mencapai target penurunan nasional. Di samping itu, tenaga kesehatan masih mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi Cengkraman Mata Elang yang berimbas pada terhambatnya tugas pencegahan dan penanganan *stunting*.

c) Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana telah berjalan efektif. menurut Nugroho dalam Rahmatillah, Miradhia dan Runiawati (2021) Ketepatan pelaksana merupakan keterlibatan tiga lembaga yang berperan sebagai implementor meliputi pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau pelaksanaan sebuah kebijakan program yang bersifat monopoli. Implementor dalam program Cengkraman Mata Elang meliputi Dinkes,

Dinkominfo, 27 Puskesmas khususnya Puskesmas Bonang II selaku pencetus program serta kader. Terciptanya sinergitas antar aktor-aktor tersebut menjadi salah satu tujuan dari program Cengkraman Mata Elang.

Menurut Handayaniingrat (dalam Aprilianto, 2016), salah satu kriteria sinergitas yaitu koordinasi, dalam koordinasi harus memuat kesepakatan dan komitmen mengenai pembagian tugas dan tanggung yang jelas. Sejalan dengan pendapat tersebut, pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor dalam program Cengkraman Mata Elang tidak mengalami kendala dan telah dibagi secara seimbang sesuai bidangnya masing-masing. Minimnya kendala karena program Cengkrama Mata Elang menjadi satu-satunya inovasi yang mendapat Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai inovasi daerah Kabupaten Demak sehingga berada di bawah naungan Pemda Kabupaten Demak.

Dinas Kesehatan bertugas memfasilitasi pelatihan kader serta menentukan aktor yang berperan sebagai inputer data, aktor pemilah data, aktor eksekutor data, dan aktor pemberi umpan balik atas data yang dilaporkan. Kedua, Dinkominfo bertugas sebagai developer yang merancang hingga memelihara sistem aplikasi Cengkraman Mata Elang serta sebagai fasilitator saat pelatihan kader.

Ketiga, Tenaga kesehatan puskesmas khususnya bidan koordinator bertugas memantau perkembangan *stunting* di seluruh desa binaan di wilayah kerja puskesmas melalui aplikasi Cengkraman Mata Elang. Apabila kader melaporkan indikasi *stunting*, maka tenaga kesehatan harus membantu melakukan intervensi melalui pemberian rujukan atau makanan tambahan untuk balita. Puskesmas juga bertugas melakukan sosialisasi dan pelatihan secara mandiri kepada kader di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Khusus Puskesmas Bonang II sebagai pencetus program Cengkraman Mata Elang juga bertugas sebagai fasilitator saat pelatihan kader.

Keempat, kader bertugas melaporkan kondisi ibu hamil dan balita saat atau diluar posyandu. Data kesehatan yang diinput oleh kader meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan melalui menu yang telah tersedia di aplikasi. Apabila data yang diunggah muncul peringatan indikasi *stunting*, kader harus mendata balita-balita yang masuk kategori *stunting* untuk dilaporkan kepada bidan desa. Data yang diunggah oleh kader dapat dipantau oleh bidan desa, ibu lurah, puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Menurut Tripathi dan Reddy (dalam Firmansyah, Mangngasing, dan Susanti, 2022) aspek yang perlu diperhatikan dalam

koordinasi diantaranya kontinuitas yaitu proses berkesinambungan dan harus berlangsung setiap saat mulai dari tahap perencanaan. Sejalan dengan itu, koordinasi antar aktor dalam program Cengkraman Mata Elang telah dilakukan secara kontinu. Saat awal perancangan program, koordinasi dilaksanakan secara masif dan intensif meski tidak terjadwal. Bahkan kerap dilaksanakan minimal satu minggu sekali. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan secara langsung, *zoom meeting*, atau *whatsapp group* menyesuaikan kesepakatan antar aktor. Selama pelaksanaan koordinasi, aktor yang terlibat meliputi Dinkes, Dinkominfo dan Puskesmas Bonang II, belum ada koordinasi yang melibatkan seluruh aktor dari dinas hingga kader. Keterlibatan puskesmas dalam koordinasi menyesuaikan undangan dari dinas. Kini segala bentuk pelaporan dan pemantauan lebih banyak disampaikan melalui *whatsapp group* sehingga koordinasi pertemuan secara langsung menyesuaikan kondisi tertentu. Meski demikian, koordinasi antara puskesmas dengan bidan desa dan kader masih rutin dilaksanakan minimal satu bulan sekali untuk memantau perkembangan laporan dari kader khususnya perkembangan *stunting*.

d) Pemantauan Program

Pemantauan program Cengkraman Mata Elang telah berjalan efektif. Ratnasari

(2018) mengemukakan bahwa sebuah program akan berjalan baik apabila dilakukan pemantauan secara rutin dan optimal. Dinas Kesehatan selaku *leading sector* berperan sebagai evaluator program Cengkraman Mata Elang, Dinkes memiliki petugas admin yang memantau perkembangan data *stunting* yang diunggah oleh kader pada aplikasi Cengkraman Mata Elang secara *realtime*. Wilayah dengan tingkat persentase pelaporan data yang rendah menunjukkan bahwa kader belum melakukan tugasnya untuk melaporkan data balita dan ibu hamil melalui aplikasi Cengkraman Mata Elang. Tindakan yang dilakukan Dinkes yaitu melakukan intervensi kepada seluruh puskesmas, kemudian dari puskesmas menyampaikan himbuan kepada kader di wilayah kerjanya untuk meningkatkan produktivitas dalam melakukan pelaporan data balita dan ibu hamil.

Dinkominfo selaku developer program telah menggunakan anggaran sesuai porsinya untuk melakukan pemeliharaan rutin pada sistem aplikasi untuk menghindari aktivitas ilegal yang masuk ke dalam perangkat. Salah satu pemeliharaan yang dilakukan yaitu berhasil menggagalkan situs judi online yang berupaya mengiklankan layanan judi online pada perangkat aplikasi. Dinkominfo juga membantu mengatasi kendala sistem yang disampaikan oleh Dinkes, puskesmas

maupun dari kader termasuk menerima masukan untuk membarui dan menambah fitur-fitur pada aplikasi sehingga penggunaan aplikasi untuk mencegah *stunting* berjalan optimal.

Pada tingkat puskesmas, pengawasan dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Petugas Gizi, dan Bidan Koordinator selama satu bulan sekali karena penginputan data penimbangan di posyandu dilakukan selama satu bulan sekali. Sedangkan di tingkat desa diawasi bidan desa. Puskesmas melakukan monitoring terhadap bidan desa, dan bidan melakukan monitoring terhadap kader. Bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain memantau jumlah data ibu hamil dan kunjungan yang telah dilakukan pada ibu hamil.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Program Cengkraman Mata Elang Dalam Mencegah Kasus *Stunting* di Kabupaten Demak

1. Sumber Daya

a. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat pelaksanaan program Cengkraman Mata Elang. Faktor pendukung dari sumber daya finansial antara lain sebagai berikut

a) Tersedianya anggaran khusus untuk program Cengkraman Mata Elang

Pelaksanaan program Cengkraman Mata Elang didukung oleh anggaran yang

bersumber dari APBD Kabupaten Demak yang dialokasikan kepada Dinkes dan Dinkominfo. Pada Dinkes anggaran digunakan untuk penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan kader serta membiayai fasilitator yang mendampingi pelatihan kader. Pada Dinkominfo, anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan sistem aplikasi mulai dari perancangan hingga pemeliharaan. Anggaran tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya sesuai porsinya sehingga mampu mendukung keberhasilan program Cengkraman Mata Elang.

b) Tersedianya anggaran khusus pencegahan dan penanganan *stunting* di luar anggaran program Cengkraman Mata Elang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Demak, pada tingkat desa terdapat anggaran khusus untuk menangani *stunting* yang bersumber dari dana desa. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan intervensi kepada balita yang mengalami *stunting* melalui pemberian bantuan makanan tambahan selama 4 bulan atau 120 hari dengan minimal dana Rp 12.000 per anak.

c) Dukungan bantuan pencegahan dan penanganan *stunting* dari OPD di Kabupaten Demak

Bentuk bantuan non finansial untuk penanganan *stunting* meliputi Dinas Kesehatan yang memberikan BMT (Bantuan Makanan Tambahan) lokal selama 2 bulan. Dinpermadesp2kb yang mengikutsertakan kader dalam Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas untuk mengunjungi ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita. Dinpermakin memberikan bantuan *septic tank* serta Dinsos memberikan bantuan susu untuk balita *stunting*. Keterlibatan OPD tersebut menunjukkan adanya sinergitas antar aktor dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Demak.

Sedangkan faktor penghambat dari sumber daya finansial yaitu tidak adanya bantuan anggaran untuk kader selaku pelaksana program Cengkraman Mata Elang. Padahal kader memegang peran penting dalam mendeteksi *stunting* secara cepat melalui penggunaan aplikasi Cengkraman Mata Elang. Tanpa bantuan kader, tenaga kesehatan baik Dinkes maupun Puskesmas tidak mampu memantau perkembangan *stunting* di seluruh wilayah di Kabupaten Demak. Segala kebutuhan kader dalam menjalankan tugas menginput data ibu hamil dan balita pada aplikasi Cengkraman

Mata Elang seperti *handphone*, paket data, dan lainnya adalah milik pribadi.

b. Sumber Daya Fasilitas

Sumber daya fasilitas menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program Cengkraman Mata Elang. Hal ini karena aplikasi Cengkraman Mata Elang masih aktif digunakan kader untuk mendeteksi *stunting* pada balita hingga saat ini. Fitur yang tersedia dalam aplikasi tergolong sudah lengkap meliputi deteksi ibu hamil berisiko tinggi, input kelahiran bayi, input abortus atau keguguran, input data posyandu, dan input deteksi dini risiko *stunting* pada balita. Kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana dari program Cengkraman Mata Elang juga telah mumpuni karena telah melalui pengujian oleh para juri pada setiap *event* di tingkat nasional. Saran dan kritik dari juri telah diakomodasi untuk menghasilkan program yang unggul. Dinkominfo selaku developer program juga mengakomodasi masukan dari tenaga kesehatan dan kader untuk melakukan perbaikan, pembaharuan dan pemeliharaan sistem. Tujuannya agar aplikasi terhindar dari aktivitas ilegal yang memaksa masuk ke dalam perangkat seperti situs iklan judi online.

2. Peranan Pendamping

Peranan pendamping menjadi faktor pendukung efektivitas program Cengkraman Mata Elang. Hal ini karena pemberian pendampingan kepada kader

dikatakan sering karena pendampingan dimulai dari pengenalan program hingga kader mampu menggunakan aplikasi Cengkraman Mata Elang secara mandiri. Dinkes telah memfasilitasi sosialisasi dan pelatihan kader. Dinkominfo telah merancang dan memelihara sistem aplikasi, menyelesaikan segala kendala akibat sistem, serta mengakomodasi seluruh saran untuk pengembangan aplikasi. Sementara puskesmas juga tetap memantau kegiatan kader dalam menjalankan program Cengkraman Mata Elang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa program Cengkraman Mata Elang dalam mencegah *stunting* di Kabupaten Demak yang diukur melalui kriteria efektivitas program meliputi sosialisasi program, tercapainya tujuan, Ketepatan pelaksana, dan pemantauan program belum berjalan efektif. Kriteria yang belum efektif yaitu sosialisasi program dan tercapainya tujuan. Sosialisasi program belum berjalan efektif karena saat ini persentase penginputan dan pelaporan ibu hamil dan balita pada aplikasi Cengkraman Mata Elang justru mengalami penurunan yang disebabkan

kesadaran yang rendah. Kader yang telah terlatih juga banyak yang mengundurkan diri tanpa sebab atau karena pergantian kepala desa yang baru sehingga menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas dan loyalitas kader masih rendah.

Kriteria tercapainya tujuan juga belum berjalan efektif karena program Cengkraman Mata Elang belum membantu menurunkan target *stunting* di Kabupaten Demak hingga mencapai target penurunan nasional sebesar 14%. Serta tenaga kesehatan selaku pengguna aplikasi mengalami kendala teknis berupa perekapan seluruh data masih bersifat manual dan belum ada sinkronisasi antara NIK dengan data pribadi balita dan ibu hamil yang berpotensi munculnya kesalahan data.

Selanjutnya kriteria ketepatan pelaksana telah berjalan efektif karena aktor yang terlibat telah mendapatkan tugas dan tanggungjawab sesuai porsinya di bidang masing-masing. Pelaksanaan koordinasi antar aktor juga telah dilaksanakan secara kontinu. Koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* melalui pertemuan langsung, *zoom meeting*, atau di *whatsapp group*.

Kriteria pemantauan program juga telah berjalan efektif. Pemantauan perkembangan data ibu hamil dan balita dari hasil laporan kader di aplikasi

Cengkraman Mata Elang dipantau oleh Dinkes dan puskesmas. Sedangkan pemantauan dan pemeliharaan sistem aplikasi secara rutin dilakukan oleh Dinkominfo.

2. Faktor pendukung efektivitas program Cengkraman Mata Elang meliputi tersedianya anggaran khusus program Cengkraman Mata Elang dan khusus penanganan dan pencegahan *stunting*, adanya dukungan bantuan pencegahan dan penanganan *stunting* dari berbagai OPD di Kabupaten Demak, ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap, serta adanya pemberian pendampingan kepada kader yang intens. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak adanya anggaran untuk kader sebagai pelaksana program.

B. Saran

1. Guna meningkatkan efektivitas program Cengkraman Mata Elang dalam mencegah *stunting* di Kabupaten Demak
 - 1) Perlunya pemberian angket survey evaluasi yang harus diisi oleh kader setiap bulannya untuk mengetahui kritik dan saran kader selama pelaksanaan program Cengkraman Mata Elang.
 - 2) Perlunya pembentukan kebijakan bahwa kader wajib melaporkan data kondisi kesehatan ibu hamil dan balita

baik yang berisiko tinggi maupun *stunting* melalui aplikasi dan disampaikan kepada bidan desa kemudian bidan desa melaporkan kepada puskesmas.

- 3) Perlu bekerjasama dengan Dindukcapil Kabupaten Demak agar saat penginputan NIK langsung sinkron dengan data pribadi ibu hamil dan balita. Tujuannya untuk mencegah kesalahan penginputan data.
 - 4) Perlunya pembaharuan sistem aplikasi berupa pengelompokan data berdasarkan bulan dan data dapat di *expore* dalam bentuk *file excel* secara langsung. Tujuannya untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan dan merekap data secara keseluruhan.
2. Guna mengatasi faktor penghambat efektivitas program Cengkraman Mata Elang dalam mencegah *stunting* di Kabupaten Demak berupa perlunya pemberian insentif dan *reward* kepada kader untuk meningkatkan semangat dan motivasi kader, serta untuk menunjukkan bahwa kontribusi kader sangat dihargai dalam pelaksanaan program Cengkraman Mata Elang terutama dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Demak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, L., Paselle, E., & Zulfiani, D. (2018). Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental Untuk Pelayanan Publik Oleh Pusat Kajian Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) Iii Lan Samarinda. *Administrasi Negara*, 6(4), 8199-8213.
- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *E-Journal UNIMUS*, 2(3).
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Firmansyah, R., Mangngasing, N., & Sussanti, S. (2022). Koordinasi pendidikan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat Kana Mapande Kota Palu. *PARADIGMA: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 109-128.
- Hardjana, A. A. (2010). Sosialisasi dan Dampak Budaya Organisasi. *Jurnal ilmu komunikasi*, 7(1), 137084.
- Irianto, B. S. (2020). Mediasi Sikap Pada Pengaruh Kemudahan Terhadap Minat Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Ukm Di Purwokerto. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(1), 1-13.
- Marwiyah, S., Rahmadi, A., & Aisyah, R. (2022). Efektivitas Program Cash For Work (CFW) Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo):(Studi Pada Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo). *Administratio*, 13(1), 15-32.
- Mayasoni, L. (2022). Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 2(3), 169–173. Retrieved from <http://jisip.org/index.php/jsp/article/view/69>
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Norsanti, N. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>
- Novianti, R., Purnaweni, H., & Subowo, A. (2021). Peran Posyandu Untuk Menangani Stunting di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 378-387.
- Rahmatilah, N. A., Miradhia, D., & Runiawati, N. (2021). Efektivitas Program Mal Grha Tiyasa Sebagai Model Pelayanan Publik Di Kota Bogor. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 96. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35043>
- Ratnasari, W. (2018). Efektivitas Pelayanan Pengintegrasian Informasi Melalui Pusat Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Manajemem Review*, 7(4).
- Samsudin, M., Kusuma, A. R., & Djaja, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di

Bagian Sosial Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal
Administrative Reform*, 2(1), 74-87.

Umroh, A., & Endahsari, S. (2019).
Sumber Daya Dalam
Mengimplementasi Program
Adiwiyara di SMK Negeri 1
Ngasem. *Jurnal Dinamika
Manajemen Pendidikan*, 3(1), 49.
[https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.
p49-55](https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p49-55)